

Implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ujung Lamuru Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Khusus Perempuan)

Surianto^{✉1}, Baso R², Satriani²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstrak

Implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Ujung Lamuru Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Ujung Lamuru Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Serta Untuk Mengetahui Apakah BUMDES Di Desa Ujung Lamuru Ini Sudah Menerapkan SAK ETAP. Penelitian Ini Menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif, Yaitu Dengan Mendeskripsikan Atau Menguraikan Hasil Dari Wawancara Yang Dilakukan Saat Di Lapangan Untuk Menarik Kesimpulan. Hasil Dari Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ujung Lamuru Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Belum sepenuhnya Menerapkan SAK ETAP Dalam Penyajian Laporan Keuangannya.

Kata Kunci: *Standar Akuntansi Keuangan (SAK); Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP); BUMDes.*

Copyright (c) 2022 Surianto

✉ Corresponding author :

Email Address : surianto@wirabhaktimakassar.ac.id

PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) adalah standar yang mengatur tentang perlakuan akuntansi terhadap UMKM dan koperasi yang ada di Indonesia, tetapi semua kegiatan koperasi juga berpedoman pada undang-undang dan peraturan pemerintah terbaru yang dikeluarkan oleh menteri terkait dalam hal ini Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) Republik Indonesia No 12 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi. Sesuai surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Nomor : 200/SE/Dept.1/ XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 bahwa sehubungan dengan perberlakuan IFRS, maka entitas Koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yaitu diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan, pengaturannya lebih sederhana, mengatur transaksi umum yang tidak kompleks. Laporan keuangan koperasi yang dikatakan berstandart dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yaitu meliputi

penyusunan Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas laporan keuangan. Tujuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) sendiri yakni memberikan kemudahan bagi entitas seperti koperasi.

Koperasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Makmur Batang. Sebagai koperasi syariah, kegiatan usaha KSPS Makmur Batang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan pola bagi hasil (syariah). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No. 39/Per/M.UKM/XII/2007 Pasal 1 ayat (3) bahwa kegiatan KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Penelitian ini memfokuskan pada KJKS dengan beberapa pertimbangan yang diambil dari artikel "Pembiayaan Syariah Jadi Perhatian Pemerintah" di Media 4 Keuangan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI (2014) sebagai berikut:

- a. Keluarnya fatwa bunga haram dari MUI yang di release tanggal 16 Desember 2003,
- b. Meningkatnya kesadaran umat Islam untuk melakukan praktek berekonomi secara syariah, yang diindikasikan dengan pesatnya pertumbuhan Bank Syariah, Asuransi Syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya,
- c. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga memberi peluang pasar yang potensial untuk produk-produk berbasis syariah,
- d. tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik sehingga perkembangan ilmu ekonomi syariah juga semakin baik,
- e. Kondisi ekonomi global yang dilanda krisis, menjadikan ekonomi syariah sebagai sistem alternatif penyelesaiannya,
- f. Institusi bisnis syariah yang telah terbukti mempunyai daya tahan tinggi terhadap krisis dan menerapkan prinsip adil.

Selain alasan tersebut, pemilihan KJKS juga didasari oleh pendapat Giu (2014) bahwa KJKS memiliki banyak keunggulan dibandingkan oleh lembaga keuangan informal seperti rentenir, yaitu siap memberikan pinjaman modal tanpa agunan, dengan prosedur administrasi yang mudah, rendah biaya transaksi, dan yang tak kalah penting bebas bunga. Hal tersebut tentunya akan menjadi daya tarik bagi pengusaha mikro untuk beralih dari lembaga keuangan informal semacam rentenir kepada KJKS.

Keberadaan dan perkembangan koperasi khususnya koperasi (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa di desa Ujung Lamuru cukup menarik perhatian pemerintah karena koperasi tersebut menunjukkan perkembangan kinerja yang baik dan dapat memandirikan masyarakat yang ada di desa Ujung Lamuru kecamatan Lappariaja kabupaten Bone, walaupun tidak banyak koperasi (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) yang berada di desa Ujung Lamuru, namun koperasi (simpan pinjam khusus perempuan) ini dapat membantu pemerintah mengurangi pengangguran, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dll. koperasi (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) ini berada di sekitar desa Ujung Lamuru Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone yang bergerak dalam usaha simpan pinjam.

Koperasi/Simpan Pinjam Khusus Perempuan di desa Ujung Lamuru menjadi obyek penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui apakah koperasi/Simpan Pinjam Khusus Perempuan pada Badan Usaha Milik Desa di desa Ujung Lamuru sudah menerapkan sistem Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) atau belum.

Annisa (2018) Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dengan mengutamakan rasa persaudaraan, solidaritas dan persaudaraan diantara para anggota, koperasi hadir ditengah-tengah masyarakat dengan mengemban tugas dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan pada umumnya. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri dari kesulitan-

kesulitan ekonomi yang diderita oleh mereka. Sumber daya ekonomi yang ada dalam koperasi terbatas lebih mengutamakan kesejahteraan dan kemajuan anggotanya terlebih dahulu. Agar suatu koperasi bisa berjalan lancar, koperasi harus bisa bekerja secara efisien dan mengikuti adanya prinsip dan kaidah ekonomi yang ada. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama menurut asas kekeluargaan, maka koperasi perlu membangun diri. Untuk mengimbangi dengan perkembangan keadaan, ketentuan tentang perekonomian di Indonesia telah diperbaharui, yaitu dengan UU perekonomian NO 25 Tahun 1992. Yang dimaksud dengan koperasi adalah “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan”.

Di pasal 33 ayat 1 UUD 1945 juga menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha harus terampil dan berperan penting untuk memajukan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Hadirnya koperasi ini dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat golongan ekonomi lemah khususnya perempuan untuk memperbaiki ekonomi mereka. Di Indonesia dikenal dua bentuk koperasi yaitu koperasi primer dan sekunder. Koperasi primer koperasi orang perorangan sedangkan koperasi sekunder himpunan dari koperasi primer yang dibentuk sekurang-kurangnya dari koperasi primer. Salah satu bentuk koperasi primer adalah koperasi unit desa yang merupakan suatu kesatuan ekonomi dari masyarakat yang mempunyai fungsi sebagai penyalur sarana produksi khususnya pengadaan pangan dan pengembangan ekonomi rakyat yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama di wilayah pedesaan.

Pada dasarnya organisasi tersebut lahir karena adanya suatu kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri, sebagai contoh wadah (organisasi) yang berada di lingkungan pedesaan, seperti pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA), program pembangunan mandiri (PNPM), organisasi masyarakat setempat (OMS desa), remaja mesjid, maupun organisasi organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, sebagai contoh dalam hal ini adalah organisasi “simpan pinjam khusus perempuan.” Yang menjadi salah satu sumber ekonomi bagi masyarakat desa Ujung Lamuru adalah bertani dan berkebun yang merupakan mata pencarian mereka. Di samping menjadi masyarakat petani kaum perempuan membuat suatu wadah yaitu koperasi, dimana koperasi ini hanya dikhususkan untuk kaum perempuan saja yang penghasilannya di bawah rata-rata. Annisa (2018).

Koperasi simpan pinjam khusus perempuan ini tepatnya berada di desa Ujung Lamuru Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Koperasi simpan pinjam khusus perempuan adalah salah satu koperasi primer yang dibentuk sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Koperasi simpan pinjam khusus perempuan merupakan salah satu lembaga keuangan dengan mengembangkan sistem simpan pinjam bagi kaum perempuan yang bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada kelompok perempuan dengan modal usaha simpan pinjam kelompok atau tanggung renteng. Melalui koperasi inilah masyarakat bisa nemampung simpanan anggota dan melayani peminjaman anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa yang diperoleh menurut hasil rapat anggota. Melihat kegiatan kegiatan yang tawarkan oleh koperasi ini sendiri cukup bagus dan perannya tidak jauh berbeda dengan komunitas lainnya seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan seperti Dharma Wanita. Salah satu contohnya adalah kerajinan tangan seperti membuat bunga pengantin, selain itu mereka juga ada membuat keterampilan menjahit pakaian dan bordir dengan tujuan bisa mendapatkan pemasukan lebih dari organisasi tersebut. Annisa (2018)

Padahal dengan adanya koperasi ini bisa menjadi dampak positif bagi masyarakat karena sudah berani menampilkan karya-karya yang mereka lakukan untuk bisa memperdayakan diri khususnya bagi perempuan yang ada di pedesaan, salah satunya di desa padang itu sendiri. Akhir akhir ini koperasi amanah tidak berjalan seperti yang diharapkan karena ada suatu permasalahan yang dihadapi oleh koperasi Amanah salah satunya yaitu anggota diberikan pinjaman modal dengan harapan modal tersebut bisa di kembalikan tepat waktu dan dapat dipinjamkan oleh anggota lain, akan tetapi modal tersebut tidak digerakkan melainkan berjalan di tempat sehingga anggota yang ingin meminjam modal untuk membangun usaha harus mengalami kemacetan. Annisa (2018).

Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Armayuliza dkk (2013) dengan judul Analisis penerapan SAK ETAP pada koperasi di universitas pasir pengaraian dan memperoleh hasil bahwasanya koperasi UPP belummemahami akuntansi koperasi yang seharusnya diterapkan oleh koperasi. Laporan keuangan koperasi UPP disusun secara bersama-sama oleh ketua, sekretaris, dan bendahara pada koperasi tersebut. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Reza Ramdani dkk (2018) dengan judulnya Implementasi SAK ETAP pada UMKM Warkop di Makassar. Disimpulkan hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan Pengelola UMKM Warkop hanya sebatas laporan bisnis yang dibuat sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masing-masing Pengelola UMKM Warkop.

Dan penelitian yang di lakukan oleh Rifkaliana Jimmy Berlian dkk (2020) yang SAK ETAP : Evaluasi Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa yang memperoleh hasil penelitian bahwa penyajian laporan keuangan KUD Sumber Karya tahun 2018 sudah sesuai dengan SAK ETAP, namun terdapat beberapa komponen dan informasi yang harus dilengkapi. Dengan demikian, KUD Sumber Karya dapat dianggap siap untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

METODOLOGI

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

HASIL PENELITIAN

Proses penyusunan laporan keuangan BUMDes di desa Ujung Lamuru Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.

BUMDes simpan pinjam khusus perempuan terletak di desa Ujung Lamuru Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. BUMDes simpan pinjam khusus perempuan berdiri pada tahun 2019 dimana pada awalnya BUMDes simpan pinjam khusus perempuan merupakan BUMDes suka maju yang bergerak di usaha pembayaran jasa listrik masyarakat dan peternakan sapi. Untuk menjalankan usaha BUMDes simpan pinjam khusus perempuan maka dibentuklah pengurus BUMDes yang dipilih oleh warga desa. pengurus dipilih melalui musyawarah dan ditetapkan dengan surat keputusan desa Ujung Lamuru. Tugas pengurus mengelola semua kegiatan BUMDes. Salah satu tugas penting pengurus BUMDes adalah menyusun laporan keuangan tahunan BUMDes Ujung Lamuru sesuai dengan pedoman SAK ETAP.

Hasil wawancara penulis dengan pengurus BUMDes Ujung Lamuru diperoleh informasi bahwa ada beberapa transaksi yang dilakukan oleh pihak BUMDes Ujung Lamuru antara lain sebagai berikut:

1. pemberian modal usaha;
2. pemberian pinjaman mingguan;
3. penerimaan jasa bank;
4. penerimaan denda;
5. pembayaran gaji dan honor pengurus BUMDes;
6. pembayaran administrasi dan umum;
7. pembayaran pajak;
8. transaksi lain lain.

Semua transaksi yang terjadi dicatat oleh bagian keuangan BUMDes dalam berbagai jenis buku yaitu buku kas pinjaman, daftar uang masuk, daftar uang keluar. Berbagai jenis buku yang digunakan oleh pengurus BUMDes tersebut fungsinya sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan.

Buku kas pinjaman digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan peminjaman baik modal kerja, konsumtif maupun mingguan. Daftar uang masuk digunakan untuk mencatat neraca. Neraca BUMDes Ujung Lamuru terdiri dari aktiva dan passive dibuat dalam bentuk T. Aktiva terbagi atas aktiva lancar dan aktiva tetap sedangkan passive terdiri atas utang lancar dan modal.

Hal yang perlu di perbaiki dalam neraca BUMDes Ujung Lamuru adalah penyajian akumulasi penyusutan aktiva tetap yang masih belum tepat. BUMDes Ujung Lamuru menyajikan aktiva tetap sesuai dengan jenisnya misalnya tanah, bangunan, dan inventaris kantor namun akumulasi penyusutan aktiva tetap digabungkan menjadi satu untuk bangunan dan inventaris. Semestinya akumulasi penyusutan aktiva tetap dipisahkan sesuai dengan jenis aktiva tetap, misalnya bangunan dengan akumulasi penyusutan bangunan dan inventaris kantor dengan akumulasi penyusutan inventaris kantor.

Setelah dilakukan pembahasan tentang proses penyusunan laporan keuangan tahunan BUMDes Ujung Lamuru maka penulis rincikan berbagai proses tersebut di bawah ini:

1. proses pencatatan transaksi pada BUMDes Ujung Lamuru menggunakan buku kas pinjaman, daftar uang masuk, daftar uang keluar.
2. Proses pengikhtisaran pada BUMDes Ujung Lamuru menggunakan neraca dimana neraca ini terdapat beberapa perkiraan dengan saldonya masing masing.
3. Proses penyajian laporan keuangan pada BUMdes Ujung Lamuru hanya menggunakan dua jenis laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi.

Proses penganalisaan laporan keuangan pada BUMDes Ujung Lamuru belum dilakukan dengan alasan tidak begitu penting menurut pihak pengurus BUMDes Ujung Lamuru.

1. Proses penyusunan laporan keuangan menurut SAK ETAP

Dalam SAK ETAP (2013) tentang penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa laporan keuangan menunjukkan dengan wajar posisi keuangan, kinerja

keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan asset, kewajiban, penghasilan dan beban.

Proses dalam penyajian laporan keuangan biasanya mengikuti siklus akuntansi (*accounting cycle*) yang dimulai dari terjadinya transaksi sampai disusunnya laporan keuangan tahunan secara lengkap bagi pemakai. SAK ETAP (2013) tentang penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komperatif) minimum satu tahun sekali.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa proses penyajian laporan keuangan tahunan pada BUMDes Ujung Lamuru belum sepenuhnya mengikuti standar ilmu akuntansi yang berlaku dan juga belum memenuhi pedoman SAK ETAP.

Proses penyajian laporan keuangan dimulai dengan pencatatan (jurnal) atas transaksi yang dilakukan oleh BUMDes Ujung Lamuru yaitu dengan mencatat perkiraan beserta nilai transaksi pada posisi debit dan kredit.

Berikut ini penulis sajikan beberapa contoh transaksi dan pencatatannya:

No	Tangga 1 Pembu kuan	Uraian		Debet	Kredit
		No. Aku n	Nama Akun		
1	18 Jan 2019	1.1	Kas Tunai	2,000,000	
		5.1	Pendapatan dari Unit Simpan Pinjam		2,000,000
			<i>penerimaan angsuran Dr Usaha Listrik</i>		
2	18 Jan 2019	1.2	Kas di Bank	2,000,000	
		1.1	Kas Tunai		2,000,000
			<i>Penyetoran ke bank</i>		
3	06 Mar 2019	1.1	Kas Tunai	29,000,000	
		5.3	Pendapatan dari Unit Peternakan		29,000,000
			<i>Penerimaan Modal Dan Angsuran Dari Penggemukan sapi (ALIMUDDIN)</i>		
4	06 Mar 2019	1.2	Kas di Bank	29,000,000	
		1.1	Kas Tunai		29,000,000
			<i>Penyetoran Ke Bank</i>		

5	12 Mar 2019	1.1	Kas Tunai	54,289,000	
		5.1	Pendapatan dari Unit Simpan Pinjam		54,289,000
			Penerimaan Modal Dan Angsuran dari Usaha Listrik (Spp)		
6	12 Mar 2019	1.2	Kas di Bank	54,289,000	
		1.1	Kas Tunai		54,289,000
			Penyetoran ke Bank		
7	12 Mar 2019	1.1	Kas Tunai	5,700,000	
		1.2	Kas di Bank		5,700,000
			Penarikan Di Bank		
8	12 Mar 2019	6.8	Biaya Laba yang Dibagi ke Pemdes	2,800,000	
		6.9	Biaya Laba yang Dibagi ke Pengurus	2,900,000	
		1.1	Kas Tunai		5,700,000
			Penyaluran Operasional Pengurus		
9	02 Apr 2019	1.1	Kas Tunai	6,900,000	
		1.2	Kas di Bank		6,900,000
			Penarikan Di Bank		
10	02 Apr 2019	6.8	Biaya Laba yang Dibagi ke Pemdes	3,000,000	
		6.9	Biaya Laba yang Dibagi ke Pengurus	3,900,000	
		1.1	Kas Tunai		6,900,000
			Penyaluran Operasional Pengurus (Insentif Pengurus, PAD, Operasional, Tambahan Modal)		
11	14 Agt 2019	1.1	Kas Tunai	40,000,000	
		1.2	Kas di Bank		40,000,000
			Penarikan Di Bank		

12	14 Agt 2019	1.6	Piutang Dagang/Usaha	40,000,000	
		1.1	Kas Tunai		40,000,000
			<i>Pemberian Pinjaman Ke 5 Nasabah (Musdalifa,Hj.Linda,Hasna,Ros mayani,Irawati)</i>		
13	28 Sept 2019	1.1	Kas Tunai	3,515,500	
		1.2	Kas di Bank		3,515,500
			<i>Penerimaan Angsuran Dari 6 Nasabah</i>		
14	28 Sept 2019	1.2	Kas di Bank	3,515,500	
		1.1	Kas Tunai		3,515,500
			<i>Penyetoran Ke Bank</i>		
15	28 Sept 2019	1.1	Kas Tunai	10,000,000	
		1.2	Kas di Bank		10,000,000
			<i>Penarikan Di Bank</i>		
16	28 Sept 2019	1.6	Piutang Dagang/Usaha	10,000,000	
		1.1	Kas Tunai		10,000,000
			<i>Pengadaan Masker @2000 pict</i>		
17	19 Okt 2019	1.1	Kas Tunai	2,000,000	
		1.2	Kas di Bank		2,000,000
			<i>Penarikan Di Bank</i>		
18	19 Okt 2019	6.5	Biaya Diklat Pengurus	2,000,000	
		1.1	Kas Tunai		2,000,000
			<i>Biaya Bimtek 2 orang</i>		
19	30 Okt 2019	1.1	Kas Tunai	2,582,500	
		1.2	Kas di Bank		2,582,500
			<i>Penerimaan Angsuran Dari 6 Nasabah</i>		

20	30 Okt 2019	1.2	Kas di Bank	2,582,500	
		1.1	Kas Tunai		2,582,500
			<i>Penyetoran Ke Bank</i>		
21	27 Nov 2019	1.1	Kas Tunai	2,582,500	
		1.2	Kas di Bank		2,582,500
			<i>Penerimaan Angsuran Dari 6 Nasabah</i>		
22	27 Nov 2019	1.2	Kas di Bank	2,582,500	
		1.1	Kas Tunai		2,582,500
			<i>Penyetoran Ke Bank</i>		
23	31 Des 2019	1.1	Kas Tunai	13,215,000	
		1.2	Kas di Bank		13,215,000
			<i>Penerimaan uang masker Dr Pak Desa + Angsuran Dari 6 Nasabah</i>		
24	31 Des 2019	1.2	Kas di Bank	13,215,000	
		1.1	Kas Tunai		13,215,000
			<i>Penyetoran Ke Bank</i>		
			Jumlah	343,569,000	343,569,000

Dari pencatatan(jurnal) diatas selanjutnya di posting di buku besar sesuai dengan jenis perkiraan dan jumlah debit dan kreditnya. Namun hal ini tidak dilakukan oleh pihak BUMDes Ujung Lamuru baik itu pencatatan (jurnal) maupun posting buku besar BUMDes Ujung Lamuru.

Proses penyajian laporan keuangan juga melalui proses peringkasan dan ikhtisaran dimana proses peringkasan menggunakan neraca saldo dan proses pengikhtisaran menggunakan neraca lajur. Berbeda dengan BUMDes Ujung Lamuru yang tidak menggunakan neraca saldo dan neraca lajur untuk penyusunan laporan keuangan. BUMDes Ujung Lamuru menggunakan neraca untuk pengikhtisaran.

Dari segi penyajian laporan keuangan tahunan yang dibuat oleh BUMDes Ujung Lamuru belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman SAK ETAP yang berlaku. Seperti telah dijelaskan bahwa BUMDes Ujung Lamuru hanya menyajikan dua jenis laporan keuangan tahunan dari yang seharusnya sebanyak lima jenis laporan keuangan sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP.

SAK ETAP mengharuskan entitas termasuk pula Ujung Lamuru untuk menyajikan lima jenis laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan namun BUMDes Ujung Lamuru hanya menyajikan dua laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi.

SIMPULAN

Dimana neraca menyediakan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumTUGASber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas pemilik dalam sumber daya bersih. Laporan laba rugi menyediakan informasi yang diperlukah oleh para investor dan kreditur untuk membantu mereka memprediksi jumlah, penetapan waktu dan ketidakpastian dari arus kas masa depan. Laporan perubahan ekuitas laporan yang merangkum perubahan perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik selama satu periode waktu tertentu. Laporan arus kas menyajikan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Catatan atas laporan keuangan dalam PSAK nomor 1 paragraf 70 disebutkan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen.

Referensi:

- Afrijal, A. Y. (2016). Analisis Penerapan SAK-ETAP Pada Koperasi di Universitas Pasir Pengaraian. *Cano Ekonomos*, 5(2), 97-102.
- Aulia, T. Z., & Hamdani, H. (2020). implementasi sak etap sebagai upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengaruhnya terhadap kesehatan koperasi di kota tangerang. *COMPETITIVE*, 4(2), 130-143.
- Aulia, T. Z., & Hamdani, H. (2020). implementasi sak etap sebagai upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengaruhnya terhadap kesehatan koperasi di kota tangerang. *COMPETITIVE*, 4(2), 130-143.
- Anderson, W., & Pols, H. (2012). Scientific patriotism: Medical science and national self-fashioning in Southeast Asia. *Comparative Studies in Society and History*, 54(1), 93-113.
- Annisa. (2018). Tentang Peran Koperasi Wanita Amanah Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
- Berlian, R.J., Luhsari, D. I., & Ismanto, B. (2020). SAK ETAP: Evaluasi Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 67-78.
- Faedlulloh, D. (2016). Implementasi Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasiandi Kabupaten Banyumas: Studi Transisi Pasca Regulasi Yang

Inkonstitusional. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 2(2).

FAUZIYAH, F. (2015). analisis penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (sak-etap) pada koperasi (studi kasus kp-ri bina warga benjeng) (Doctoral dissertation, universitas wijaya putra).

<http://jurnal.untan.ac.id> Penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis sak etap

Maulana, F. (2016). Implementasi Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Mengenai Kesamaan Hak Anggota Koperasi (Studi Di Koperasi Kosayu Malang) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

NANIK, S. (2012). implementasi e-procurement terhadap transparansi, akuntabilitas dan kompetitas pengadaan barang/jasa pemerintah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Di Pemerintah Kabupaten Kebumen) (Doctoral dissertation, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).

Novita, N., & Puspita, P. (2018). tingkat implementasi dan persepsi terhadap sak etap (studi pada koperasi perkebunan sawit). *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 10(2), 105-115.

Pratama, S. Y. (2017). pendaftaran badan hukum koperasi menurut undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang).

Pujiwidodo, D. (2015). penerapan sak etap dalam laporan keuangan pada koperasi karyawan pt. tata busana jakarta. *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2).

Ramdani, M. R., & Kamidin, M. (2018). Implementasi SAK-ETAP pada UMKM warkop di Kota Makassar. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 3(2), 109-117.

Stefani, L., & Mukti, A. B. (2012). Operasional konsep bauran promosi di Hotel Amaris Pemuda Semarang. *Jurnal Ilmiah Dinamika Kepariwisata*, 11(2).

Setyaningsih, I. A. (2014). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah (Ksps).

Sudarwati, Y. (2010). studi perbandingan antara undang-undang no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dengan rancangan undang-undang koperasi 2010 comparative studies of cooperatives act number 25/1992 with cooperatives act draft 2010.

Siagian, Raven Pardomuan, and Sifrid S. Pangemanan. (2016). "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP Pada Koperasi Karyawan Bank Sulut Go."

Seran, A. M. I. (2017). Evaluasi penyajian laporan keuangan credit union berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (sak etap) revisi tahun 2013.

Sari, M. Y. (2020). Analisis penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan badan usaha milik desa (bumdes) purwoasri berseri (studi kasus pada badan usaha milik desa di desa purwoasri) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

U. S. P. O., DAN, M. K. D. U. K. (2018). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Yani, A., Mangkunegara, A. A. P., Revisi, P. K. E., & Aditama, R. Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

ZANNAH, R. (2017). Penentuan harga pokok produksi menggunakan metode full costing dalam rangka menentukan harga jual tahu pada ud. maju jaya sejahtera.